

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PARIWISATA
KOTA BIMA - TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KOTA BIMA
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Bima Tahun 2020. Penyusunan Rencana kerja merupakan salah satu upaya sistematis Dinas Pariwisata Kota Bima dalam melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan untuk mewujudkan Pelestarian, Pengembangan Budaya Lokal baik Adat istiadat maupun Seni dan Atraksi Tradisional, Pengembangan Pengelolaan Obyek Wisata Alam dan pembangunan sarana prasarana pendukung baik sarana prasarana pariwisata serta sarana prasarana olah raga dan juga peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pariwisata Kota Bima merupakan upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pembangunan Sektor Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara menyeluruh dan merata. Selain itu Rencana Kerja Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Bima Tahun 2020 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan di Sektor Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga khususnya di Kota Bima.

Demikian penyusunan Rencana Kerja ini dibuat, atas dukungan berbagai pihak disampaikan terima kasih.

Raba-Bima, 2019
Plt. Kepala Pariwisata Kota Bima,

SUNARTI, S.Sos.,M.M.
NIP. 19620706 198602 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksaaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	13
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas da Fungsi OPD	16
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD	17
2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	20
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi OPD.....	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	25
3.3. Program dan Kegiatan	25
BAB IV : P E N U T U P	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bima dengan peradaban Budaya Dou Mbojo yang sudah mengakar sejak jaman kerajaan hingga sekarang masih dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat Kota Bima dalam kesehariannya. Baik sosial, Budaya dan Seni tradisional yang melekat pada kegiatan Upacara Adat, Prosesi Pernikahan, Khataman Qur'an, Khitanan dan lain-lain serta bukti-bukti sejarah Kerajaan dan Kesultanan masih juga dapat dilihat sebagai Situs, Kepurbakalaan dan bahkan menjadi Objek Daya Tarik Wisata yang ada di Kota Bima dan menjadi objek kunjungan bagi wisatawan lokal, nusantara bahkan mancanegara.

Disisi lain, sumber daya alam Kota Bima juga memiliki daya tarik tersendiri sebagai Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) karena Kota Bima berada di bibir Teluk Bima yang sangat indah yang menawarkan berbagai atraksi wisata laut dan pantai seperti; berenang, berperahu, memancing, bersantai, melihat kehidupan masyarakat nelayan serta menikmati makanan khas desa tradisional nelayan. Disisi lain alam dan hutan serta hamparan sawah yang luas juga dapat dilihat di Kota Bima sebagai aset potensial wisata alam yang pada saat nya nanti akan menjadi salah satu Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) andalan bagi Kota Bima.

Disisi lain, Kebijakan Pemerintah Kota Bima untuk mengembangkan sektor pariwisata telah memicu pembangunan terutama pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti : Hotel, Losmen, Home Stay, Bungalow, Rumah Makan, Restoran, Bar/Cafe, Travel Agen, Money Changer, Pusat perbelanjaan dan Pusat pelayanan informasi. Kegiatan-kegiatan yang menjadi pendukung kegiatan kepariwisataan di Kota Bima telah dapat memberikan peranan dan kontribusi yang cukup besar terhadap percepatan pembangunan daerah terutama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja dan peningkatan lapangan usaha sehingga pemerintah Kota Bima menetapkan sektor Kebudayaan dan Pariwisata sebagai sektor andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Keseriusan pemerintah Kota Bima dalam mengembangkan sektor pariwisata ditunjukkan dengan keseriusannya mengalokasikan dana guna membangun, memperbaiki dan

mengembangkan berbagai macam infrastuktur dikawasan wisata utamanya kawasan Teluk Bima sebagai Destinasi Unggulan Kota Bima .

Untuk mempercepat proses pengembangan pariwisata sesuai harapan pemerintah maka pemerintah segera merumuskan langkah yang tepat, efektif dan terpadu sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Bima untuk Tahun 2020. Dimana rencana kerja merupakan landasan awal perencanaan, pengembangan serta pengelolaan kegiatan kepariwisataan sekaligus sebagai upaya dalam memberikann informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan selama Tahun bersangkutan untuk mencapai target dan sasaran program kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bima.

Dengan berpedoman pada Rencana kerja ini, seluruh sumber daya yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Bima dapat menyelenggarakan program kegiatan secara sistimatis, konsisten, seimbang dan berkesinambungan sehingga pencapaian program kegiatan dapat terlaksana dengan mudah serta dapat mencapai sasarnya.

Pengembangan sektor Pariwisata di Kota Bima dalam tahapan pembangunan daerah telah dapat memberikan peranan dan kontribusi yang cukup besar terhadap percepatan pembangunan daerah terutama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja dan peningkatan lapangan usaha sehingga pemerintah Kota Bima menetapkan sektor Pariwisata sebagai sektor andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Disisi lain julukan Kota Bima sebagai salah satu Daerah Transit / persinggahan bagi wisatawan untuk mengunjungi Daerah Tujuan Wisata (*International Tourism Object*) antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur harus kita upayakan sebagai salah satu *Main Core* yang dapat kita manfaatkan untuk memperpanjang waktu singgah / *lenght of stay* wisatawan.

Sehingga dapat merubah imej Kota Bima tidak lagi menjadi daerah persinggahan / *transit* tetapi melainkan Daerah Tujuan Wisata Unggulan dengan mengemas seluruh sumber dan potensi wisata yang ada, baik wisata alam, wisata Bahari, Wisata Religius, wisata peninggalan sejarah serta wisata budaya yang didalamnya dihiasi berbagai kegiatan adat dan atraksi kesenian daerah, sehingga salah satu *icon* / merek Kota Bima sebagai ***Traditional Art And Various Civilization*** (daerah beragam Seni Budaya Tradisional). Sehingga dalam konstelasi pengembangan berbagai

obyek wisata di Kota Bima yang terstruktur maka patut direncanakan pengembangannya dalam sebuah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan pengembangan Pariwisata dan Pemuda Olahraga di Kota Bima yang berkesinambungan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Pengembangan Pariwisata tahun 2019 diarahkan untuk pengembangan destinasi kawasan Wisata Teluk Bima, Pembinaan dan pengembangan Wisata Budaya dalam bentuk pembinaan seni budaya, aktualisasi atraksi-atraksi budaya dalam even-even budaya serta peningkatan sarana dan prasaranan pendukung sektor pariwisata lainnya serta pembinaan pemuda dan olah raga.

Keberhasilan pembangunan pariwisata pemuda olahraga sesuai rencana yang tertuang dalam Renja 2019 ini perlu dilakukan secara profesional, terpadu (lintas sektoral dan kewilayahan), serta didukung oleh sistem jasa dan layanan yang handal serta diperkuat oleh sistem dan strategi pemasaran yang aktif, terfokus, dan terpadu.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bima Tahun 2020 mengacu pada beberapa Peraturan Perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2003 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota ;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas - Dinas Daerah Kota Bima ;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 - 2028;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tentang Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008 - 2013;
19. Keputusan Walikota Bima Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Bima.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Maksud :

Untuk memberikan arah dan pedoman Rencana Kerja dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bima dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima.

2. Tujuan :

- a. Mengetahui kondisi umum dan rencana program / kegiatan menuju tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima.
- b. Merencanakan Program Kegiatan Tahun 2020 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kota Bima berdasarkan perencanaan dan pengembangan kawasan hingga atraksi wisata serta standar pelayanan minimal dan jenis pelayanan sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan Dinas Pariwisata Kota Bima.

- c. Sebagai bahan evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kota Bima.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kota Bima disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Dalam mengevaluasi hasil Perencanaan Rencana Kerja tahun lalu perlu pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari sumber internal dan eksternal Dinas Pariwisata Kota Bima, baik data Primer maupun Sekunder.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dapat di evaluasi dengan seberapa banyak / prosentase program kegiatan yang di rencanakan dengan rencana program kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi Rencana Kerja secara umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program

NO	URAIAN	CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	621.330.250		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	74.790.000		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	219.930.750		
4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.817.292.500		
5	Program pengembangan Destinasi Pariwisata	3.323.332.500		
6	Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata	58.565.000		
7	Program Pengembangan SDM Kepariwisata	552.030.000		
8	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata	41.350.000		
9	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	650.400.000		
10	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	159.140.000		
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	901.500.000		

Sementara kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 51 kegiatan dari 51 kegiatan yang direncanakan pada Dokumen Rencana Kerja, yang terbagi kedalam 2 (dua) urusan kegiatan Pemerintahan Daerah yaitu Pariwisata terdiri dari 10 (sepuluh)

program dan Pemuda Olahraga terdiri dari 3 (tiga) program seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2. Evaluasi Urusan Pariwisata

No	Urusan yang dilaksanakan	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Kegiatan	%
1	Pariwisata	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
		Penyediaan jasa surat menyurat	67.200.000		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.940.000		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.500.000		
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.196.000		
		Penyediaan alat tulis kantor	77.639.850		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	58.446.000		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	127.349.500		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	168.250.000		
		Penyediaan makanan dan minuman	21.060.000		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	444.980.000		
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	35.000.000		
2.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
		Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	57.100.000		
		Pengadaan mebeleur	49.900.000		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	46.856.000		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.600.000,00		
3.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	32.500.000		
4.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
No	Urusan yang dilaksanakan	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran		
		Penyusunan peraturan perundang-undangan	31.375.000		
5.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan			

		keuangan			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	59.770.000		
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15.175.000		
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.625.000		
		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	36.253.000		
		Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	52.015.000		
6.		Program pengembangan pemasaran pariwisata			
		Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	165.360.000		
		Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	104.276.150		
		Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	304.305.500		
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	13.482.500		
		Penyusunan data base ekonomi kreatif	37.100.000		
		Partisipasi Pelestarian dan Aktualisasi Atraksi Wisata Budaya	102.890.000		
		Fasilitasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Festival Atraksi Kesenian Tradisional	225.200.000		
		Car Free Day	74.766.000		
7.		Program pengembangan destinasi pariwisata			
		Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	461.740.500		
		Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	34.999.500		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1.074.040.500		
		Pendataan dan Perencanaan Site, Destinasi, ODTW dan Kawasan Pariwisata	8.675.000		
		Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	25.675.000		
		Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Pemeliharaan dan Pengelolaan Destinasi dan ODTW	47.425.000		
		Pengelolaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	89.396.000		
		MONEV Perencanaan dan Pembanguna Destinasi, ODTW dan Kawasan	18.642.500		
8.		Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata			
		Pendampingan dan pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya	81.706.850		
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	136.645.000		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha dan Industri Jasa Pariwisata Lembaga dan Mitra Pariwisata	16.675.000		
9.		Program Pengembangan SDM Kepariwisataaan			

		Pengembangan SDM Bidang Pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	9.699.650		
10.		Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata			
		Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata, Lembaga Kepariwisata dan rekomendasi Ijin Pemandu Wisata	14.150.000		
		Standarisasi dan Sertifikasi Segala Bentuk Usaha dan Industri Jasa Pariwisata	10.445.000		
		Pendampingan dan pembentukan Kelompok Masyarakat dan Mitra	59.888.000		

Tabel. 2.3. Evaluasi Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Urusan yang dilaksanakan	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Kegiatan	(%)
1	Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			
		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	650.400.000		
2.		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			
		Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	123.615.000		
		Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat	35.525.000		
3.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			
		Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	883.525.000		
		Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	17.975.000		

Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi. Mulai dari visii sampai dengan kegiatan harus terdapat hubungan turunan. Oleh karena itu antara turunan dengan yang menurunkan harus selaras dan mempunyai hubungan logis, sehingga tidak semua komponen di dalam renstra yang diukur capaian kinerjanya. Komponen yang diukur kinerjanya hanya sasaran dan kegiatan.

Akumulasi pencapaian sasaran otomatis akan mewujudkan tujuan, akumulasi pencapaian tujuan otomatis misi diemban dengan baik, dan bila misi dapat diemban dengan baik maka visi dapat diwujudkan. Semua komponen tersebut mempunyai kaitan logis dan sebagai strategisnya adalah pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra Dinas Pariwisata Kota Bima tahun 2018 s/d 2023 sudah terdapat kaitan logis mulai dari kegiatan sampai ke pencapaian visi dalam pelaksanaannya sampai dengan tahun 2023.

a. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan pencapaian sasaran.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Oleh karena itu perumusan dan pencapaian indikator kinerja kegiatan harus selaras dan mempunyai kaitan logis dengan indikator kinerja sasaran, sehingga akumulasi pencapaian indikator kinerja kegiatan akan menghasilkan pencapaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dari 51 kegiatan atau 98,07% telah dilaksanakan secara efektif dalam pencapaian sasaran.

a. 1. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan Tujuan, Misi dan Visi.

Renstra Dinas Pariwisata Kota Bima tahun 2014/d 2018 sudah terdapat kaitan logis mulai dari kegiatan sampai ke pencapaian visi. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi. Mulai dari visi sampai dengan kegiatan harus terdapat hubungan turunan. Oleh karena itu antara turunan dengan hal – hal dibawahnya harus selaras dan mempunyai hubungan logis, sehingga tidak semua komponen di dalam renstra yang diukur capaian kinerjanya. Komponen yang diukur kinerjanya hanya sasaran dan kegiatan. Akumulasi pencapaian sasaran otomatis akan mewujudkan tujuan, akumulasi pencapaian tujuan otomatis misi diemban dengan baik, dan bila misi dapat diemban dengan baik maka visi dapat diwujudkan. Semua komponen tersebut mempunyai kaitan logis dan sebagai strategisnya adalah pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja Dinas Pariwisata Kota Bima yang dilaksanakan dari tahun 2018 s/d 2019 sudah terdapat kaitan yang sinkronisasi mulai dari kegiatan sampai ke pencapaian visi.

2. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan pencapaian sasaran

Berdasarkan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 51 (lima puluh satu) kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif.

Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan pencapaian sasaran, Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Oleh karena itu perumusan dan pencapaian indikator kinerja kegiatan harus selaras dan

mempunyai kaitan logis dengan indikator kinerja sasaran, sehingga akumulasi pencapaian indikator kinerja kegiatan akan menghasilkan pencapaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dari 51 (lima puluh satu) kegiatan atau 98,07% telah dilaksanakan secara efektif dalam pencapaian sasaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Analisis ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari sumber internal dan eksternal Dinas Pariwisata Kota Bima. Komponen renstra yang diukur kinerjanya adalah kinerja kegiatan dan kinerja sasaran (pelayanan). Analisis kinerja kegiatan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran kinerja Sasaran dituangkan dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi. Mulai dari visi sampai dengan kegiatan harus terdapat hubungan turunan. Oleh karena itu antara turunan dengan yang menurunkan harus selaras dan mempunyai hubungan logis, sehingga tidak semua komponen di dalam renstra yang diukur capaian kinerjanya.

Komponen yang diukur kinerjanya hanya sasaran dan kegiatan. Akumulasi pencapaian sasaran otomatis akan mewujudkan tujuan, akumulasi pencapaian tujuan otomatis misi diemban dengan baik, dan bila misi dapat diemban dengan baik maka visi dapat diwujudkan. Semua komponen tersebut mempunyai kaitan logis dan sebagai strategisnya adalah pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra Dinas Pariwisata Kota Bima tahun 2014 s/d 2018 sudah terdapat kaitan logis mulai dari kegiatan sampai ke pencapaian visi dalam pelaksanaannya sampai dengan tahun 2018.

Evaluasi yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal, yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Pariwisata Kota Bima terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang :

1. Efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan
2. Efektifitas pencapaian sasaran

Dalam evaluasi ini dilakukan perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Dalam evaluasi ini juga diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan, serta langkah perbaikan (pemecahan masalah) yang dilakukan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

1. Efektifitas dan efisiensi suatu Kegiatan

Efektifitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada pencapaian indikator *outcome*, *benefit* dan *impact* dari kegiatan yang bersangkutan. Efektifitas kegiatan dibagi atas dua macam yaitu : a). Efektifitas individual kegiatan, b). Efektifitas terkait dengan pencapaian program.

Efektifitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome/benefit/impact* yang telah ditetapkan. Sedangkan efektifitas terkait dengan pencapaian program merupakan kemampuan suatu kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

Dalam Sub Bab ini disajikan efektifitas individu kegiatan, sedangkan efektifitas terkait dengan pencapaian sasaran strategis dibahas dalam sub bab analisis akuntabilitas kinerja. Selama tahun 2018 Dinas Pariwisata Kota Bima telah melaksanakan 51 (lima puluh satu) kegiatan dari 12 (dua belas) Program pokok.

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dapat menghasilkan output yang sama, atau input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan.

Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi. Dalam laporan ini standar efisiensi yang dipakai adalah indeks efisiensi target/rencana/anggaran, yaitu; bila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi, maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar efisiensi, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien. Selama tahun 2018, dari sejumlah 51 (lima puluh satu) kegiatan, dan merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan secara efisien.

- **Kegiatan yang Efektif**

Dalam laporan ini, suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata outcome/benefit/impact 100% atau lebih. Selama tahun 2018, kegiatan yang telah dilaksanakan secara efektif adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) kegiatan atau 98,07 %

Tabel. 2.4. Capaian Kinerja Efektif

No	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja Rata – Rata		
		Input (%)	Output (%)	Outcome/benefit Impact (%)
	DANA ALOKASI UMUM / APBD II			
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	100	100	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	98,31	100
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	92,04	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	97,26	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	100	99,69	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	100	100
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	99,99	100
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	98,59	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	100	99,05	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	100	100
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	100	95,40	100
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	100	99,75	100
2	Pengadaan mebeleur	100	98,89	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	100	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	99,88	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	99,72	100
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	100	100	100
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Penyusunan peraturan perundang-undangan	100	99,92	100
E	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	95,73	100
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100	99,67	100
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100	99,53	100
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	100	99,72	100
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	100	100	100
F	Program pengembangan pemasaran pariwisata			
1	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	100	97,27	100
2	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	100	99,57	100
3	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	100	99,49	100
4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	100	93,01	100

5	Penyusunan data base ekonomi kreatif	100	97,90	100
6	Partisipasi Pelestarian dan Aktualisasi Atraksi Wisata Budaya	100	100	100
7	Fasilitasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Festival Atraksi Kesenian Tradisional	100	100	100
8	Car free Day	100	92,98	100
G	Program pengembangan destinasi pariwisata			
1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	100	98,46	100
2	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	100	97,95	100
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	100	96,81	100
4	Pendataan dan Perencanaan Site, Destinasi, ODTW dan Kawasan Pariwisata	100	98,44	100
5	Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	100	100	100
6	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Pemeliharaan dan Pengelolaan Destinasi dan ODTW	100	98,28	100
7	Pengelolaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	100	96,54	100
8	MONEV Perencanaan dan Pembanguna Destinasi, ODTW dan Kawasan	100	88,76	100
H	Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata			
1	Pendampingan dan pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya	100	99,01	100
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	100	98,77	100
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha dan Industri Jasa Pariwisata Lembaga dan Mitra Pariwisata	100	87,71	100
I	Program Pengembangan SDM Kepariwisataan			
1	Pengembangan SDM Bidang Pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	100	97,42	100
J	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata			
1	Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata, Lembaga Kepariwisataan dan rekomendasi Ijin Pemandu Wisata	100	100	100
2	Standarisasi dan Sertifikasi Segala Bentuk Usaha dan Industri Jasa Pariwisata	100	100	100
3	Pendampingan dan pembentukan Kelompok Masyarakat dan Mitra	100	99,17	100
K	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			
1	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	100	99,52	100
L	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			
1	Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat	100	97,65	100
2	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	100	99,90	100
M	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			
1	MONEV Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100	100	100

2. Pencapaian Program

Dalam laporan ini, program dianggap tercapai apabila realisasi indikator-indikator kinerja sasaran berhasil diwujudkan rata-rata 90 % atau lebih. Selama tahun 2018 dari 13 (tiga belas) sasaran program strategi yang ingin diwujudkan Dinas Pariwisata Kota Bima, ada 13 (tiga belas) sasaran program strategi (98,07%) telah berhasil dicapai secara memuaskan.

Semua sasaran program strategi tahun 2018 yang telah berhasil dicapai, dengan rincian sebagai berikut

Tabel. 2.5. Capaian Program

NO	Sasaran Program Strategi	Angka Capaian Rata-Rata (%)
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	99,27
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99,60
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	100
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99,92
5.	Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	98,42
6.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	98,69
7.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	97,26
8.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	99,52
9.	Program Pengembangan Industri dan kemitraan Pariwisata	98,07
10.	Program pengembangan SDM Kepariwisata	97,42
11.	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata	99,41
12.	Program Pembinaan dan Masyarakat Olah Raga	99,05
13.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan khususnya pada urusan kebudayaan dan pariwisata. Adapun isu – isu sentral yang harus diupayakan untuk dapat diprioritaskan dalam kurun waktu yang harus ditentukan dan sedapat mungkin dapat dilaksanakan dalam kegiatan rutin atau tahunan.

Beberapa isu penting itu antara lain:

1. Penambahan Event kebudayaan dalam mengapresiasi seni tradisional masyarakat sehingga pelestarian dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat dapat terlaksana secara berkelanjutan

2. Pelestarian dan Perlindungan asset dan peninggalan sejarah kepurbakalaan (Cagar Budaya) yang harus dimaksimalkan sehingga penghargaan serta pemahaman sejarah masyarakat Bima bisa diketahui oleh para generasi sebagai educational information resource.
3. Perlunya memberikan bantuan dan penghargaan kepada sanggar-sanggar seni pada masing-masing kelurahan 1 (satu) sanggar seni guna menggali dan melestarikan budaya tradisional Bima dalam rangka menjadikan Kota Bima sebagai Kota **Seribu Atraksi Seni Budaya**.
4. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan
5. Melaksanakan dan mengefektifkan kemitraan kegiatan kepariwisataan dengan masyarakat dan stakeholder pariwisata.
6. Kajian serta perencanaan secara multi sektoral terkait dengan pengembangan kawasan wisata sampai pada atraksi wisata yang berkelanjutan.
7. Penataan kawasan, obyek daya tarik serta atraksi wisata secara komprehensif dan kontinyu dengan tidak mengabaikan lingkungan dan keberlanjutannya.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Pelaksanaan RKPD yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata sudah dapat dikatakan sangat relevan dengan kondisi kerja dan tantangan yang ada pada urusan Kebudayaan dan pariwisata, hal ini dapat dilihat dari program kegiatan yang telah tertuang dalam RKPD yang sudah menghimpun segala bentuk kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan yang ada pada masyarakat Kota Bima.

Begitupun halnya dengan hasil pelaksanaan program kegiatan tersebut, yang mana sudah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, baik evaluasi kinerja program, kegiatan maupun evaluasi sarannya. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.6. Review Program Kegiatan

NO	Sasaran Program Strategi	Angka Capaian Rata-Rata (%)
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	99,27

2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99,60
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	100
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99,92
5.	Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	98,42
6.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	98,69
7.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	97,26
8.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	99,52
9.	Program Pengembangan Industri dan kemitraan Pariwisata	98,07
10.	Program pengembangan SDM Kepariwisata	97,42
11.	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata	99,41
12.	Program Pembinaan dan Masyarakat Olah Raga	99,05
13.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100

Selama tahun 2018, dari 13 (tiga belas) Program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bima, semuanya telah berhasil dilaksanakan dan mencapai sarannya, kemudian dari 51 (lima puluh empat) sasaran strategis yang ingin diwujudkan Dinas Pariwisata Kota Bima, dari 51 (lima puluh empat) tersebut atau (98,07%) tersebut telah berhasil dicapai. Tercapainya sasaran strategis tersebut belum maksimal antara lain disebabkan karena dukungan personal yang belum memadai, mengingat pendidikan kepariwisataan personal / staf masih minim, dukungan dana / biaya yang belum memadai, dukungan lintas instansi yang belum maksimal namun dukungan masyarakat / peserta kegiatan yang sesuai dengan tujuan kegiatan lebih menonjol mengingat kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang berasal dari kegiatan masyarakat (*community base tourism*).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Community Base Tourism (pariwisata berbasis masyarakat) merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima khususnya urusan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mengingat dampak yang sangat menonjol yang terjadi oleh kegiatan Pariwisata adalah masyarakat lokal terutama yang ada disekitar objek daya tarik wisata (ODTW). Begitupun dengan dampak ekonomi yang dihasilkan sangat luas dan mampu menggerakkan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Beberapa usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada urusan Pariwisata, Kepemudaan olahraga Kota Bima sudah banyak yang di akomodir dan dilaksanakan secara terus menerus dan berlanjut setiap tahunnya, terutama pada **Program pengembangan pemasaran pariwisata, Program pengembangan industri dan kemitraan pariwisata dan Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.**

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional terhadap tugas pokok dan fungsi OPD

Berbagai organisasi internasional antara lain PBB, Bank Dunia dan World Tourism Organization (WTO), telah mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azazi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang termasuk pula Indonesia. Pertumbuhan pariwisata di dunia mengakibatkan Indonesia menjadi sadar akan pentingnya pariwisata bagi perekonomian dan taraf hidup bangsa. Pendapatan terbesar Republik Indonesia berasal dari dua sektor yaitu migas dan non migas.

Berbicara mengenai pariwisata, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya dan alam yang luar biasa sebagai *basic needs of tourism*. Letak yang strategis diantara dua benua dan dua samudra menjadikan alam Indonesia memiliki perpaduan - perpaduan yang tentunya mengundang wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Untuk mendukung kepariwisataan di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah terus melakukan peningkatan atau mengembangkan serta terus melestarikan kebudayaan tradisional untuk menunjang pariwisata dan kebudayaan nasional. Jika di lihat dari sektor eksternalnya yakni dengan mengadakan pembangunan sarana dan prasaranya, (infrastruktur) dari semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan sedemikian rupa sehingga memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan. Misalnya mempersiapkan sarana hotel yang bertaraf internasional, mempermudah sarana komunikasi dan memperlancar sarana transportasi baik darat, laut maupun udara dalam skala internasional dan sarana dan prasarana olahraga. Oleh karena itu Pengembangan pariwisata di Indonesia sangatlah penting, hal ini sangat terlihat jelas dengan dimasukkannya keberadaan pariwisata dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) melalui ketetapan MPR NO 11/ MPR/ 1993.

“pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan Negara, serta penerimaan devisa meningkat dengan terpeliharanya kepribadian bangsa serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup serta peningkatan prestasi cabang olahraga.”

Pembangunan kepariwisataan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang melibatkan seluruh kegiatan masyarakat, bangsa dan negara untuk terwujudnya salah satu aspek dari kepentingan nasional. Sektor pariwisata dalam pengembangannya diharapkan dapat menempati posisi utama untuk menggantikan sektor migas sebagai salah satu pilar penopang devisa negara. Masalah pariwisata merupakan suatu hal yang sudah mendunia. Masing masing negara berusaha mempromosikan potensi yang berhubungan dengan kepariwisataannya. Dalam konteks regional, Indonesia pun terus berupaya untuk terus mempromosikan potensi kepariwisataannya. Tiap tahun angka kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara terus mengalami peningkatan, sehingga telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan global sebagai akibat dari perkembangan dunia pariwisata, baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan orang untuk melakukan perjalanan wisata, cara berfikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan sektor kepariwisataan secara global serta peningkatan arus kunjungan wisatawan internasional, maka secara tidak langsung telah berdampak kepada kebutuhan penyediaan segala komponen atau produk-produk pariwisata. Penyediaan produk-produk pariwisata tersebut (*supply side*) dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang mencakup penyediaan sarana dan prasarana alat transportasi, akomodasi, agen perjalanan, makanan dan minuman, tour operator, pramuwisata dan barang souvenir wisata lainnya baik pada skala nasional, regional bahkan lokal / Kabupaten dan Kota.

Untuk mendukung industri pariwisata, khususnya dalam rangka penyediaan seluruh komponen industri pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata termasuk Kabupaten / Kota bahkan pedesaan (*rural tourism*), maka perlu dilakukan suatu perencanaan yang baik dan terpadu dengan melibatkan seluruh unsur terkait, seperti pemerintah, tenaga ahli pariwisata, masyarakat setempat (yang terlibat dalam usaha wisata) dan para pemangku kepentingan lainnya. Perencanaan

penyediaan produk-produk wisata tersebut tidak hanya akan berdampak positif dalam rangka menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata (DTW), namun juga untuk memotivasi para pelaku industri pariwisata untuk lebih inovatif, kreatif dan menciptakan nilai tambah (value added) terhadap berbagai produk atau pelayanan (services) yang akan diberikan kepada para wisatawan yang akan berkunjung terutama sekali pada daerah obyek wisata unggulan yang ada di Kabupaten / Kota di Indonesia yang masih sangat kental nuansa seni budaya tradisional dan alamnya termasuk Nusa Tenggara Barat yang sudah menjadi kawasan unggulan pariwisata di Indonesia bersama dengan Sumatera Barat, Sulawesi Utara dan selatan serta Nusa Tenggara Timur .

Sangat disadari bahwa pengembangan pariwisata sebagai suatu industri strategis memerlukan investasi yang sangat besar, seperti perbaikan aksesibilitas (jembatan, dan jalan) dari dan ke daerah tujuan wisata, pembangunan hotel dengan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan, jaringan angkutan wisata (darat, laut dan udara) yang perlu diperluas, pembangkit tenaga listrik yang perlu ditingkatkan, penyediaan air bersih yang harus diciptakan, sarana dan jaringan komunikasi yang perlu diperluas, SDM para pelaku bisnis pariwisata yang perlu ditingkatkan, promosi, pemasaran produk-produk pariwisata unggulan ke dalam dan luar negeri yang perlu ditingkatkan dan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan suatu daerah wisata.

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dewasa ini pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Salah satu aspek pembangunan yang penting adalah pengembangan dalam bidang ekonomi, dimana kepariwisataan termasuk salah satu sektor pembangunan yang diharapkan. Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan bertujuan untuk turut mewujudkan peningkatan kepribadian bangsa dan masyarakat Indonesia yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, budaya dan kondisi geografis diseluruh

wilayah republik indonesia secara arif, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Sehingga kegiatan pariwisata mampu memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti; sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerjasama antar negara, pemberdayaan usaha kecil serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya, sehingga secara implisit pembangunan pariwisata juga mampu mendorong pembangunan daerah sehingga mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong pemanfaatan potensi dan kapasitas masing-masing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat membangun pariwisata nusantara dalam memupuk persatuan dan cinta tanah air.

Kebijakan pariwisata nasional merupakan kebijakan dasar dari pengembangan pariwisata regional dan daerah sehingga terjadi kesinambungan dengan kegiatan di propinsi dan daerah, begitupula halnya dengan struktur organisasi yang secara hirarkis masih memiliki kesamaan tugas dan fungsinya. Disisi lain prioritas pembangunan pariwisata di utamakan kepada daerah – daerah yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Kemudian program dan strategi pemasaran yang dikemas sesuai dengan produk unggulan dan objek – objek wisata yang layak dijual. Bahkan Kementrian Kebudayaan dan pariwisata telah mengalokasikan dana khusus bagi daerah-daerah baik propinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki objek dan destinasi unggulan yang layak untuk dipromosikan baik skala regional maupun internasional. Peraturan perundangan kepariwisataan, kebijakan – kebijakan sosial budaya, lingkungan dan ekonomi yang secara hirarkis dilakukan oleh pemerintah pusat, pendidikan dan latihan pariwisata masih dilakukan secara sentral guna menyamakan pemahaman serta kemampuan mengembangkan ide – ide yang inovatif terhadap kegiatan kepariwisataan, begitu pula halnya dengan sosialisasi kepada daerah terhadap standarisasi pengembangan fasilitas, desain dan sistim pelayanan masih dilakukan oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata khususnya Ditjen – Ditjen yang membawahi langsung kegiatan – kegiatan tersebut.

Rencana Pengembangan Pariwisata Nasional juga dibuat dengan berbagai pertimbangan dan alasan untuk dapat dilaksanakan pada level regional (propinsi) maupun Kabupaten / Kota), dimana kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang mampu memberi kontribusi dan manfaat yang maksimal terhadap kegiatan pariwisata di segala sektor dengan berbagai alasan;

1. Ekonomis,
 - Adanya kontribusi pendapatan masyarakat (pengusaha jasa pariwisata dan masyarakat lokal)
 - Penciptaan lapangan kerja
 - Kontribusi neraca pembayaran
 - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
 - Diversifikasi kegiatan ekonomi dan ekspor
2. Politis
 - Konsep dasar di bidang politik adalah pendekatan keamanan
 - Peraturan dan prosedural keluar masuk negara
 - Menjalin hubungan dengan negara lain (internasional)
 - Mampu menjadi duta dalam menjaga citra dan nama negara dimata dunia
 - Serta pengakuan ke – integrasian.
3. Lingkungan Hidup dan Tata Guna Lahan
 - Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
 - Kompetensi penggunaan tanah
 - Kebutuhan infrastruktur
4. Kebutuhan Koordinasi
 - Lintas Sektoral
 - Jenis Produk Komposit
 - Pengembangan terpadu dengan citra yang sama
5. Sosial Budaya
 - Bangga atas budaya asli (Penggalian dan penciptaan budaya dari budaya indonesia sampai pada tataran budaya lokal / tradisional)
 - Konsevasi Budaya (Menjaga dan Melestarikan budaya indonesia juga budaya lokal / tradisional)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Sebagai upaya mencapai **VISI** dan **MISI** Pemerintah Kota Bima maka ditetapkan beberapa **TUJUAN** pembangunan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 yaitu :

1. Meningkatnya usaha pariwisata;
2. Meningkatnya kualitas pemuda dalam pencapaian prestasi olahraga.

Sedangkan **SASARAN** yang akan dicapai dalam mencapai Tujuan :

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
2. Meningkatkan prestasi olahraga.

3.3. Program dan Kegiatan (terlampir)

Untuk menghasilkan upaya kinerja yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bima Tahun Anggaran 2019, maka diarahkan juga untuk meningkatkan dan memelihara mutu Lembaga pelayanan Pemerintah melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara berkelanjutan dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas tentang program kegiatan yang akan dilakukan dan sarannya, sehingga dari pada itu semua adalah dapat meningkatkan sikap, mental dan pola pikir serta kualitas aparatur dalam melayani masyarakat.

Rencana kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat kami uraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 2.7. Program Kegiatan (RENJA – 2020)

PROGRAM			KEGIATAN
1			2
PROGRAM PERKANTORAN	PELAYANAN	ADMINISTRASI	1. Penyediaan jasa surat menyurat
			2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)
			3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, stnk dan bpkb)
			4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
			5. Penyediaan alat tulis kantor
			6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	9. Penyediaan makanan dan minuman
	10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	4. Penyusunan RENJA/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
	5. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD
ROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	1. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
	2. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
	3. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
	4. Penyusunan data base ekonomi kreatif
	5. MICE
	6. Pendampingan pelestarian dan aktualisasi atraksi wisata budaya
	7. Fasilitasi dan kerjasama penyelenggaraan festival atraksi kesenian tradisional
	8. Car free day
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
	2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga / dunia usaha
	3. Pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata
	4. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan atraksi, destinasi dan odtw
	5. Koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan odtw
	6. Pengelolaan atraksi, destinasi dan odtw

	7. Monev perencanaan dan pembangunan destinasi, odtw dan kawasan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	1. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KEMITRAAN PARIWISATA	1. Pengembangan dan penguatan informasi dan database
	2. Kegiatan pendampingan dan pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha dan industri jasa pariwisata lembaga dan mitra pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPARIWISATAAN	1. Pengembangan SDM dan BIMTEK profesionalisme bidang pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	1. Pendampingan dan pembentukan Kelompok Masyarakat dan Mitra
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	1. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
	2. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
	2. Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga

BAB VII P E N U T U P

Percepatan Desentralisasi merupakan langkah dan peluang untuk meningkatkan pembangunan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan daerah, namun disisi lain merupakan tantangan yang perlu pendekatan dan pembelajaran yang sistematis, bertahap serta terencana dan terarah.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembiayaan dan peralatan merupakan hambatan sekaligus tantangan yang perlu pemecahan secara cepat melalui *capacity building*, peningkatan akses dan mutu.

Adanya kendala dalam penyusunan perencanaan memerlukan proses pembelajaran secara kreatif, inovatif bagi Tim Perencana Kota (TPK) dan kepedulian dari pemegang kebijakan serta semua *stakeholder* yang terkait.

Dengan disusunnya Rencana Kerja sebagai acuan rencana dalam melaksanakan program / kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bima tahun 2019 dapat memberikan arah program pembangunan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang muncul dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima yang ada pada Dinas Pariwisata Kota Bima.

Raba – Bima, Desember 2018
Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima,

SUNARTI, S.Sos.,M.M.
NIP. 19620706 198602 2 007